



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SULKHAN CHAKIM**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
3. NHK : **777568**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.505.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/174 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 1370 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
3. Tanah Seluas 1255 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000
5. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 244.000.000**

1. MOTOR, HONDA ASTREA Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOTOR, HONDA SPM/SEPEDAMOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOBIL, WULING ALMAZ MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 7.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	587.658.976
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.343.658.976
III. HUTANG	Rp.	42.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.301.658.976

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.